

INDUSTRIALISASI MINYAK SAWIT DI INDONESIA: RESISTENSI WARGA DUSUN TANJUNG PUSAKA, KALIMANTAN TENGAH TERHADAP INDUSTRI SAWIT

Indonesia's Palm Oil Industrialization: The Resistance of Tanjung Pusaka Villagers, Central Kalimantan Against Palm Oil Industry

Ica Wulansari*)

Sosiologi, Pascasarjana, Universitas Padjadjaran

*)E-mail: ica.wulansari3@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia's Palm oil industry is the greatest export commodity in the world. Palm oil industry has been developed since Soeharto's administration with World Bank's initiative. Indonesia's development pattern is modernization which is fully supported by global capitalist agent. Furthermore, the government of Indonesia has issued policies to support this industry and the ease of accessibility for investor to build in Indonesia. Most of the policies focus on economic interest with lack of attention to social and environmental issues. The paper applies qualitative method to analyze through literature studies and depth interview. As a result, the writer attempt to discuss the relationship of various concepts and theories regards to Resistency, Modernization and The Modern World-System theory. In fact, Indonesia as palm oil producer do not have bargaining power to determine the price due to global politic has structured to limit profit. Meanwhile, Central Kalimantan has the negative impact of environment and society that caused by palm oil industry. Tanjung Pusaka villagers refuse their region to be transform as palm plantation because they believe that their life is better now that being part of plantation. The purpose of this paper is to explain how villagers have capability of resistance for the sake of social life and environmental preservation.

Keywords: Palm, Indonesia, industry, policies, Central Kalimantan

ABSTRAK

Industri minyak sawit Indonesia merupakan komoditas ekspor terbesar di dunia saat ini. Industri minyak sawit telah dibangun sejak kepemimpinan Soeharto yang didukung oleh Bank Dunia. Pola pembangunan Indonesia adalah modernisasi yang disokong oleh agen kapitalis global. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung industri minyak sawit dan memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di sektor ini. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya fokus terhadap kepentingan ekonomi dan minimnya perhatian terhadap isu sosial dan lingkungan hidup. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasilnya, penulis berusaha mendiskusikan hubungan antara beragam konsep dan teori mengenai Resistensi, Modernisasi dan Teori Sistem Dunia. Faktanya, Indonesia sebagai produsen minyak sawit tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena politik global yang telah dibentuk untuk membatasi keuntungan yang didapatkan. Sementara itu, provinsi Kalimantan Tengah mengalami dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial yang disebabkan oleh industri minyak sawit. Warga Dusun Tanjung Pusaka menolak wilayahnya dijadikan perkebunan sawit karena mereka yakin hidupnya akan lebih baik dibandingkan menjadi bagian dari perkebunan sawit. Tujuan penulisan ini paper ini untuk menjelaskan bagaimana masyarakat desa mampu melakukan upaya resistensi demi kepentingan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci: Sawit, Indonesia, industri, kebijakan, Kalimantan Tengah

PENDAHULUAN

Industri sawit di Indonesia saat ini merupakan komoditas terbesar di dunia (SSI Review, 2014). Walaupun industri sawit menyumbangkan stimulus untuk perekonomian, namun dampak negatif terkait lingkungan hidup dan sosial tidak dapat terhindarkan. Perkebunan sawit yang masif membutuhkan lahan yang luas, tidak hanya lahan hutan, bahkan lahan gambut menjadi lahan untuk bertanam sawit. Apabila musim kemarau tiba, lahan gambut sangat rentan terbakar. Selain itu, dampak sosial akibat industri sawit pun cukup besar ketika warga pekebun dan nelayan 'dipaksa' menjadi buruh industri sawit dan warga pun mengalami kerugian ekonomi akibat berkembangnya industri tersebut.

Intensitas kebakaran hutan semakin meningkat sejak kawasan hutan di Kalimantan menjadi industri pembalakan dan sawit. Berdasarkan data CIFOR, kebakaran hutan luas mulai terjadi

tahun 1982-1983, sekitar 3,6 juta ha hutan di Kalimantan Timur terbakar. Kalimantan Timur merupakan Fokus pertama industri produksi kayu Indonesia dan konsesi pembalakan sejak tahun 1970-an. Kemudian tahun 1997-1998 terjadi kebakaran hutan akibat El Nino yang menyebabkan kerusakan mencapai Rp 4,57 triliun (Bank Indonesia, 2016). Kejadian tersebut berulang pada tahun 2015 yang diduga kebakaran hutan berasal dari perkebunan sawit. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengeluarkan data mengenai luas lahan terbakar kurun waktu 1 Juli hingga 20 Oktober 2015 mencapai 2.089.911 hektar. Dengan luasan 618.574 hektar lahan gambut dan 1.471.337 hektar non gambut. Provinsi Kalimantan Tengah pun tidak luput dari kebakaran hutan dan lahan (Mongabay, 2015).

Industri sawit di Provinsi Kalimantan Tengah berdampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Hal tersebut berdasarkan data bahwa provinsi Kalimantan

Tengah merupakan salah satu provinsi yang terparah mengalami kebakaran hutan maupun lahan dan krisis kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak yang cukup serius bagi lingkungan hidup dan sosial. Menurut Bank Dunia, kebakaran dan krisis kabut asap merugikan ekonomi Indonesia sebesar 16 milyar USD (atau Rp. 221 triliun).

Jumlah Titik Api (*Hotspot*) di Kalimantan Tengah

Tabel 1. Jumlah Titik Api (Hotspot) di Kalimantan Tengah

Kabupaten / Kota	Desa	Jumlah Hotspot
Palangkaraya	Kalampangan	7
	Habaring Hurung	17
	Tangkiling	19
	Bukit Tunggal	68
	Bereng Bengkel	1
	Petuk Katimpun	2
	Pager	3
	Langkai	0
	Tanjung Pinang	0
	Banturung	0
Katingan	Tewang Tampang	5
	Kampung Melayu	8
	Baon Bango	34
	Telok	1
	Tewang Karang	2
	UPT Hiang Bana	3
	Kampung Baru	0
	Tewang Kadamba	0
	Petak Bahandang	0
	Gohong	155
Pulang Pisau	Buntoi	108
	Jabiren	26
	Kanamit	73
	Paduran Sabangau	761
	Anjir Pulang Pisau	3
	Purwodadi	1
	Talio Muara	0
	Bedirih	0
	Pangkuh Sari	0
	TOTAL	

Sumber: Laporan USAID & LESTARI. Studi Dampak Kebakaran Hutan dan di Lanskap Katingan dan kahayan. 15 januari 2016. Hal. 13

Rumusan Masalah

Masifnya industri sawit terkait dengan kebijakan pemerintah yang pro terhadap investor asing. Telaah industri sawit memperlihatkan bagaimana Indonesia menjadi negara pinggir dalam tatanan globalisasi ekonomi. Namun di tengah tekanan global, beberapa kelompok kecil masyarakat melakukan tindakan resistensi terhadap liberalisasi ekonomi melalui industrialisasi minyak sawit. Konsekuensi industrialisasi adalah penggunaan lahan yang luas sehingga mempersempit kehidupan sosial warga yang telah dibangun. Maka, rumusan masalah dalam paper ini, bagaimana industrialisasi sawit berkembang dan dampak terhadap komunitas warga di Dusun Tanjung Pusaka, Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan bentuk perlindungan lingkungan

hidup warga Dusun Tanjung Pusaka secara kolektif terhadap pelestarian Danau Bagantung sebagai bentuk resistensi di tengah meluasnya kawasan lahan sawit di sekitar lokasi tersebut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) menguraikan sejarah dan perkembangan industri sawit di Indonesia, (2) Keterkaitan industri sawit Indonesia dengan politik global dan (3) Bagaimana kelompok komunitas kecil masyarakat Dusun Tanjung Pusaka bertahan (resisten) terhadap serbuan industri sawit di sekeliling wilayahnya. Bentuk resistensi ini yang dijabarkan James C. Scott: “*The first of each pair is “everyday” resistance, in our meaning of the term; the second represents the open defiance that dominates the study of peasant and working-class politics*” (Scott, 1985:32).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan hubungan kausal. Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi, data dan menganalisa objek penelitian. Data yang didapat dalam penelitian berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara mendalam terhadap pihak yang menjadi sumber telaah dalam tulisan ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dari organisasi nonpemerintah. Selain itu, data lainnya didapatkan berdasarkan studi literatur. Penelitian ini bertempat di Dusun Tanjung Pusaka Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada tanggal 9-10 Agustus 2016.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan sistematisasi sejarah, proses dan interaksi antar pelaku di tingkat lokal, nasional hingga global. Analisa bertumpu pada sikap dan tindakan yang diambil warga Dusun Tanjung Pusaka terhadap realitas yang terjadi. Tulisan ini berupaya memberikan deskripsi dengan memperkuat argumen berupa teori dan data. Menurut Boije (2010) bahwa dalam analisa data kualitatif terdapat segmentasi data (segmenting) dan mengumpulkan kembali (reassembling) secara utuh dan berurutan. Segmentasi dan mengumpulkan data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resistensi Komunitas Warga terhadap Industri Sawit

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan perhatian terhadap pembangunan perkebunan sawit. Industri sawit di Kalimantan Tengah dimulai tahun 1992. Pada tahun 1995, wilayah timur Kalimantan Tengah mengalami pembukaan lahan secara besar-besaran. Berdasarkan catatan Mashudi Noorsalim yang berjudul ‘Pengaruh Pembangunan Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat Pedalaman Kalimantan’ dari ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), pada tahun 1998, industri sawit berkembang di Kalimantan Tengah karena beberapa perusahaan perkebunan sawit besar seperti PT. Astra Argo Lestari Group, PT. Asam Jawa Group, PT. Graha Group, PT. Salim Group, PT. Sinar Mas Group, dan lain-lain. Pada tahun 2004, terdapat konversi untuk lahan sawit seluas 750 ribu hektar.

Industrialisasi sawit di Kalimantan merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah maupun ‘permainan’ agen modernisasi. Industrialisasi sawit di Kalimantan Tengah sangat terlihat jelas di sepanjang kawasan Kabupaten Pulang Pisau.

Lahan sawit tersebut dimiliki perorangan dan perusahaan, namun tidak terlihat batas maupun patokan kepemilikan, maka ketika terjadi kebakaran lahan gambut sangat sulit mendeteksi asal titik api. Kabupaten Pulang Pisau merupakan pintu masuk menuju sungai Kahayan. Sungai Kahayan berbatasan dengan Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Di seberang sungai Kahayan terdapat beberapa desa. Salah satu desa tersebut bernama Dusun Tanjung Pusaka yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau.

Menurut penuturan Suriansyah (32 tahun), Ketua RT 01 Dusun Tanjung Pusaka menyatakan dusun tersebut didiami oleh 41 Kepala Keluarga, umumnya warga bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian besar berasal dari etnis Dayak Ngaju dan Dayak Bakumpai dengan agama mayoritas yaitu Islam. Warga Dusun Tanjung Pusaka sangat patuh terhadap nasihat leluhurnya agar melestarikan lingkungan hidup untuk dapat diwariskan ke anak cucu nanti. Selain itu, warga memiliki trauma ketika saudara ataupun rekan dari dusun lain yang menjadi buruh industri sawit karena tidak lagi memiliki lahan garapan dan kehidupannya tidak lebih baik dari sebelumnya.

Umumnya, warga dusun tetangga yang telah menjual lahan, tidak lantas kehidupan menjadi membaik, karena harus menjadi buruh sawit dan uang hasil menjual lahan digunakan untuk menutup kerugian apabila terjadi kebakaran setiap tahun dan apabila harga sawit jatuh di pasaran. Selain itu, kondisi lingkungan hidup sekitarnya rusak, sehingga menyulitkan warga untuk menjadi nelayan ataupun peladang. Kehidupan ekonomi warga yang menjadi buruh sawit cukup mengesankan karena hidup kekurangan dan tidak lagi memiliki lahan ataupun alat untuk produksi. Hal lainnya, proyek satu juta hektar PLG (Proyek Lahan Gambut) yang terletak di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya yang berdekatan dengan Dusun Tanjung Pusaka memperlihatkan lahan gambut yang gagal ditanami padi tersebut saat ini mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan untuk berladang ataupun berkebun.

Persoalan utama yang dihadapi warga Dusun Tanjung Pusaka adalah legalitas lahan. Pada awalnya status kepemilikan lahan warga berdasarkan *Domein Verklaring*. Namun, seiring pergantian rezim berganti, persoalan lahan mengalami kerentanan kepemilikan. Warga dapat mengajukan klaim luas dan batas lahannya kepada Kepala Desa. Kemudian, Kepala Desa membubuhkan tanda tangan yang kemudian keluar SPT (Surat Pernyataan Tanah). Di tingkat lokal, SPT diakui keabsahannya namun di tingkat negara, SPT sangat rawan konflik. Maka, posisi Kepala Desa sangat menentukan keabsahan SPT.

Investor sawit yang hendak mendatangi Dusun Tanjung Pusaka akan masuk melalui jalur Kepala Desa. Hal tersebut dilakukan investor karena Kepala Desa memiliki data mengenai lahan yang dimiliki warga melalui SPT. Pada satu masa, Kepala Desa mendatangi Dusun Tanjung Pusaka menemui Ketua RT yang hendak melakukan negosiasi untuk pembukaan lahan sawit. Upaya yang dilakukan Kepala Desa tersebut dilakukan secara persuasif, namun Suriansyah sebagai ketua RT menolak upaya tersebut. Suriansyah menuturkan menjual lahan kepada investor lahan sawit akan menjadikan kaya mendadak tetapi tidak seterusnya. Apabila lahan rusak, maka tangkapan ikan akan menurun dan warga hanya bekerja menjadi buruh sawit tidak akan seimbang dengan kehidupan yang dijalankan warga saat ini dan di masa depan. Saat ini, walaupun warga hanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan peladang secara sederhana, namun dirasa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan menyekolahkan anak. Hasil

tangkapan ikan minimal mencapai 5 kilogram per hari dengan harga jual minimal Rp 20.000,00 per kilogram. Adapun beberapa jenis ikan yang sering ditemui di Danau Bagantung diantaranya toman, kerana, betok, baung, trandang, puyuk.

Resistensi warga dusun Tanjung Pusaka dapat ditelaah melalui tulisan James C. Scott (1989) yang berjudul *'Everyday Forms of Peasant Resistance'*. Perjuangan kelas berawal dari distorsi terhadap *state-centric* yang kemudian memunculkan perlawanan maupun pemberontakan. Upaya boikot merupakan salah satu bentuk salah tindakan resistensi. Strategi masyarakat pedesaan yang mengalami kondisi yang sulit karena mengalami eksploitasi dan ketidakadilan, maka terbentuk resistensi setelah terjadi kegagalan atau ketidakadilan dalam pola yang ada. Resistensi kelompok bawah yang bertindak sebagai bagian dari kelas sosial yang dimaksudkan untuk mitigasi atau menyangkal tuntutan (sewa, pajak penghormatan) yang dibuat oleh kelas atas (seperti pemilik lahan, pemilik mesin, peminjam uang, pemerintah) atau tuntutan seperti (pekerjaan, lahan, amal) yang berhadapan dengan kelas atas.

Tidak ada persyaratan resistensi sebagai bentuk aksi bersama. Namun sebagian bersifat kolektif (kejahatan sosial) dan ada beberapa yang menyangkut kesempatan-kesempatan marginal yang diciptakan kaum elit dengan tujuan mengurangi ancaman akan terjadinya pemberontakan. Sementara itu, kelompok masyarakat desa menghadapi keadaan fisik daerah yang menyebabkan penduduknya harus mengalami fluktuasi yang demikian besarnya terhadap hasil panen, sehingga tanpa ada gangguan elit atau pemilik modal, kelangsungan hidup mereka sudah rawan (Scott, 1981:302).

Warga dusun Tanjung Pusaka lainnya, Adi Harjo (35 tahun) menyatakan tangkapan ikan mengalami penurunan apabila terjadi kebakaran lahan. Menurunnya penghasilan dan meningkatnya biaya kesehatan ketika terjadi kebakaran lahan gambut dan kabut asap yang terletak tidak jauh dari pemukiman warga. Kebakaran lahan gambut yang terjadi tiap tahunnya, cukup mengganggu kehidupan warga. Pengalaman buruk tersebut semakin menambah resistensi terhadap industri sawit. Maka, warga memilih untuk melakukan upaya perlindungan danau tangkapan ikan dengan gaya 'pelestarian' yang cocok untuk kebutuhannya dan terbukti efektif hingga saat ini. Danau Bagantung terletak di Sungai Kahayan yang berbatasan dengan Sungai Kapuas yang merupakan kawasan lindung. Bagi warga Dusun Tanjung Pusaka, kesadaran akan menjaga kawasan Danau Bagantung berasal dari kesadaran kehidupan sosial dan ekonomi di masa depan. Maka, warga Dusun Tanjung Pusaka memiliki konsep 'Perlindungan' dan menolak konsep 'Konservasi'. Menurut Suriansyah, konsep konservasi merupakan konsep yang ditekankan oleh pemerintah yang meminimalkan peran masyarakat lokal, bahkan masyarakat lokal dianggap sebagai hama. Bagi Suriansyah, konsep perlindungan merupakan upaya yang tepat secara ekologis dan sosial dalam mengelola Danau Bagantung sesuai dengan kebutuhan warga Dusun Tanjung Pusaka.

Warga Dusun Tanjung Pusaka memilih cara pengelolaan berkelanjutan Danau Bagantung, sebagai tumpuan warga mencari ikan. Adapun persyaratan utama, dalam mencari ikan harus menggunakan alat-alat tradisional. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, warga memilih untuk melakukan patroli dengan menjaga pintu masuk menuju Danau Bagantung berdasarkan jadwal agar danau tidak terkena perusakan oleh pihak luar. Bagi pihak luar yang ingin mengambil ikan, maka harus menyetero uang kas sebesar Rp. 50.000,00. Apabila melakukan pelanggaran dengan menggunakan bom ikan atau

menyetrum, maka akan diserahkan ke pihak berwajib oleh Ketua RT.

Sejarah dan Perkembangan Industri Sawit

Pola pembagian kerja dunia berawal dari masa kolonial, salah satunya industri sawit di Indonesia. Industri sawit transnasional didirikan pertama di Sumatera Utara oleh pemerintahan kolonial Belanda tahun 1911. Pasca masa kolonial, pertumbuhan perusahaan perkebunan berkembang cukup pesat (Wakker, 2013:231). Minyak sawit Deli pertama kali dikenal di Indonesia setelah pembangunan perkebunan dilakukan. Beberapa perusahaan termasuk wilayah perkebunan kecil memiliki keterkaitan dengan kelompok korporasi minyak sawit yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang cukup luas. Investasi asing langsung untuk industri perkebunan Indonesia mulai berkembang sejak masa kemerdekaan. Pembangunan perkebunan bertahap pada tahun 1948, 1957 dan 1970-an (Corley&Tinker, 2003:16).

Pada Era kepemimpinan Soeharto, paradigma pembangunan Indonesia yang digunakan adalah modernisasi. Teori modernisasi bersumber dari supremasi universal rasionalisme Barat dan lembaga Barat yang mempengaruhi konsep pembangunan. Inti dari teori modernisasi: 'Jika Anda ingin membangun, maka membangunlah seperti kami (Barat)'. (Peet & Hartwick, 2009:104). Teori modernisasi merupakan implementasi kapitalis yang menekankan rasionalitas, maka pilihan-pilihan rasional yang mendasari negara untuk bertumpu pada kebijakan pro industri dianggap lebih efisien. Modernisasi berpedoman pada kapitalisme, adapun kapitalisme mendidik dan memilih subjek ekonomi yang dibutuhkan untuk proses bertahap secara keekonomian yang paling sesuai (Weber, 1992: 20).

Munculnya tatanan sosial dari modernitas berdasarkan kapitalisme dalam sistem ekonomi dan kelembagaan (Giddens, 1990:11). Analisis Anthony Giddens mengenai modernitas menitikberatkan pada empat dimensi institusional modernitas: Pertama, Kapitalisme, yang dikarakterisasikan secara familiar dengan produksi komoditas, kepemilikan kapital privat, upah buruh tanpa kepemilikan dan sebuah sistem kelas yang berasal dari karakteristik ini. Kedua, industrialisme yang melibatkan sumber-sumber tenaga mati dan mesin untuk memproduksi barang. Ketiga, pengawasan yang mengacu pada supervisi aktivitas populasi subjek pada bidang politik. Keempat kontrol terhadap sarana kekerasan (Martono, 2013:79-80).

Pemerintahan Orde Baru menggalakkan program transmigrasi yang berawal tahun 1960 hingga 1999. Peserta transmigrasi merupakan penduduk yang berasal dari Jawa yang kemudian menetap di Sumatera maupun Kalimantan. Maka, untuk mendukung program transmigrasi, Kementerian Kehutanan memberikan izin perambahan hutan dan lahan. Selama kurun waktu transmigrasi berlangsung, sebanyak 2 juta hektar hutan telah mengalami pembersihan. Perkebunan Nusantara (PTPN I-XIII). Di bawah pemerintahan Soeharto, perkebunan negara memperluas operasi dan menyediakan tenaga kerja melalui skema transmigrasi. Soeharto memberikan konsesi luas kepada konglomerat yang terlibat dalam industri pembalakan (Jiwan, 2013:52).

Kebijakan migrasi masyarakat Jawa sebenarnya pertama kali berjalan tahun 1951 pada era kepemimpinan Soekarno dengan rencana relokasi 48 juta warga yang berlangsung selama 35 tahun. Walaupun Soekarno terakhir memimpin tahun 1965, namun kebijakan tersebut diteruskan oleh Soeharto melalui kebijakan transmigrasi. Soeharto menentukan rencana pembangunan

menjadi pilar penting pembangunan dan kebijakan transmigrasi dalam rencana pembangunan lima tahun dimulai tahun 1969. Pada tahap ketiga dan keempat rencana pembangunan lima tahun sejak 1979 hingga 1989 telah menjadikan Sumatera sebagai tujuan kemudian dilanjutkan Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Mizuno et al, 2016:192).

Pada tahun 1970-an, lahan hutan diubah menjadi lahan pertanian melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit (Mizuno et al, 2016:1). Sejalan dengan dimulainya industri sawit, maka pemerintah memperkenalkan Metode PIR-TRANS (Perkebunan Inti Rakyat) melalui program transmigrasi tahun 1977 lewat Instruksi Presiden Nomor 1/1986 (McCarthy et al., 2013:22). Kemudian tahun 1980/1981, pemerintah meneruskan kebijakan PIR-BUN melalui proyek NES (Nucleus Estate Smallholder) dengan komoditi yang diusahakan sebanyak 7 jenis, yaitu kelapa sawit, kelapa hibrida, karet, teh, tebu, kapas dan kakao. Kebijakan tersebut dilegitimasi melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.853/1984 yang menekankan pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan PIR (Waluyo, 1999:71). Selain itu, pemerintah Indonesia pun mendapatkan restu dari agen liberalisme yaitu Bank Dunia. Bank Dunia mulai memberikan arahan dan kredit untuk mengembangkan sub sektor perkebunan rakyat di Indonesia terutama budidaya sektor komoditas utama yaitu karet, teh dan kelapa sawit. Pembangunan perkebunan meliputi perkebunan yang sudah ada dan membuka areal perkebunan baru (Siswaningsih, 1999:77).

Tahun 1980 hingga 1990-an, pembangunan perkebunan kelapa sawit cukup pesat. Metode pembangunan perkebunan menimbulkan ketergantungan di mana perkebunan inti dikelilingi oleh sekitar plasma yang terintegrasi. Metode PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dimulai tahun 1977. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1986 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/1986 dengan nama PIR-TRANS yang mengakomodasi program transmigrasi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menekankan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan pembangunan sektor perkebunan berkesinambungan (Nagata & Arai, 2013:78-80).

Pada tahun 1998, Indonesia terkena krisis ekonomi akibat rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga kondisi pasar yang lesu akibat pergantian rezim politik di Indonesia. Walaupun Indonesia memasuki era baru yaitu Orde Reformasi, namun Indonesia tetap menjalankan paradigma modernisasi sebagaimana pendahulu sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan menjadikan IMF (*International Monetary Fund*) sebagai penasihat utama. IMF memberikan resep ekonomi berupa SAP (*Structural Adjustment Program*). Salah satunya IMF memberikan paket liberalisasi investasi asing di sektor sawit. Indonesia pun melakukan ekspansi perkebunan sawit transnasional dengan alasan untuk menyembuhkan krisis keuangan. Maka, kemudian sebanyak 45 investor Malaysia sejak tahun 1998 bermitra dengan Indonesia yang membuka 1,3 juta lahan yang umumnya pemain utama penggerak perkebunan di Indonesia.

Beberapa alasan industri kelapa sawit menjadi prioritas dalam implementasi liberalisasi ekonomi di Indonesia. Pertama, industri minyak sawit menyumbang sekitar 5 persen untuk Pendapatan per kapita Indonesia per tahun. Kedua, minyak sawit menjadi komoditas penting dalam pertukaran komoditas asing. Ekspor produksi minyak sawit Indonesia mencapai lebih dari 77 persen dengan harga pasaran internasional lebih tinggi dibanding harga domestik. Ketiga, pemerintah

Indonesia menempatkan industri sawit sebagai komoditas yang membantu pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan. Selain itu, industri ini mampu menyerap 20 juta tenaga kerja di perkebunan sawit. (Varkkey, 2012:2)

Rangkaian kebijakan pemerintah terkait lahan hutan dan gambut untuk perkebunan sawit pun berlanjut. Pada 26 Desember 1995, Presiden RI mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu juta Hektar (PLG Sejuta Hektar) di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek PLG adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan konversi satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi. Kegagalan itu terjadi karena langkah-langkah yang salah mulai dari perencanaan (dimulai dengan AMDAL yang minim, data terkait kondisi fisik lahan). Tahap perencanaan yang tidak matang diikuti dengan kondisi sosial transmigran yang tidak berpengalaman mengelola lahan gambut.

Proyek ini mencakup pembangunan ribuan kilometer saluran air. Proyek PLG mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan di kawasan tersebut karena terjadinya kekeringan dan kebakaran. Fakta berikutnya, lahan gambut tidak cocok untuk dijadikan lahan penanaman padi. Sekitar separuh dari 15.594 keluarga transmigran yang dulu ditempatkan di kawasan tersebut kini telah meninggalkan lokasi tersebut. Penduduk setempat mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam di kawasan tersebut serta dampak hidrologis dari proyek tersebut. Pada kunjungan penulis tanggal 9 Agustus 2016 ke wilayah Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, lahan kritis bekas proyek PLG mengalami kebakaran hebat pada tahun 2015 sehingga kondisinya saat ini mengalami kerusakan akibat lahan gambut yang kering dan menjadi lahan tidak produktif.

Pada masa reformasi, terjadi perubahan kebijakan dan pelembagaan perkebunan kelapa sawit. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107 tahun 1999 mengenai izin usaha perkebunan telah menggantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786 tahun 1996. Izin usaha untuk peningkatan pembukaan lahan dari 200 hektar menjadi 1000 hektar. Untuk perusahaan skala besar (di bawah 1.000 hektar), dengan areal maksimal dikhususkan mencapai 20.000 hektar di satu provinsi dan 100.000 hektar di seluruh Indonesia dan kemitraan dengan kerjasama perusahaan skala kecil dan menengah sebagai hal yang diwajibkan. Kebijakan tersebut dinamakan PIR-KPPA (PIR- Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya). Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107 Tahun 1999 diganti oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357 tahun 2002 sebagai tanggapan untuk pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan struktur desentralisasi pemerintah. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357 tahun 2002, wewenang untuk mengeluarkan izin usaha perkebunan dipindahkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota. (Nagata & Arai, 2013:85)

Globalisasi dan Negara Pinggiran

Ketika ideologi kapitalis diterima secara universal, maka globalisasi menjadi suatu realitas sosial. Globalisasi meliputi gerak aliran ide dan pengetahuan, berbagi kebudayaan, masyarakat sipil global dan gerakan lingkungan hidup global. Selain itu, globalisasi ekonomi, integrasi negara-negara di dunia dengan bertambahnya aliran barang dan jasa, modal dan juga buruh. Joseph Stiglitz (2009) dalam bukunya *'Making Globalization Work'* mengakui dalam bukunya bahwa globalisasi sebenarnya dapat membawa manfaat besar bagi negara-negara maju dan berkembang, namun aturan

globalisasi yang tidak adil yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan terjadi. Selain itu, globalisasi tidak memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk berdaulat dan menentukan nasibnya sendiri.

Penerapan globalisasi yang dianggap tidak adil dapat ditelaah melalui pemikiran Immanuel Wallerstein. Teori Immanuel Wallerstein mengenai *The Modern World-System* yang membagi kawasan geografis menjadi negara inti, semi pinggiran dan pinggiran menunjukkan negara-negara maju yang menjadi Inti (core) dan mengatur pola pembagian kerja di dunia. Dimana kawasan Pusat didominasi oleh dunia-ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi seluruh sistem. Kawasan pinggiran merupakan yang tereksploitasi yang menyediakan bahan mentah kepada Inti. Kawasan semi pinggiran (semi-periphery) di antara kawasan yang mengeksploitasi dan kawasan pinggiran (periphery) yang dieksploitasi (Ritzer, 2008:324).

Di dalam kawasan pinggiran terjadi ketimpangan akibat relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Ralf Dahrendorf (1958) menyatakan dikotomi peranan sosial dalam kelompok-kelompok yang terkoordinasi, terjadi dominasi peranan positif dan negatif sebagai fakta struktur sosial. Konflik sosial dalam situasi tersebut, secara struktural dapat dijelaskan. Lebih lanjut, Dahrendorf menyatakan konflik muncul melalui relasi sosial dalam sistem. Kekuasaan menentukan relasi dalam struktur sosial. Kekuasaan sebagai kewenangan yang melekat secara legal yang mampu menundukkan individu lain tanpa kekuatan perlawanan (Susan, 2009:41).

Teori *The Modern World System* sebagai pisau analisa untuk melihat bagaimana posisi Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit yang hanya menjadi 'objek' penghasil komoditas ekstraktif. Telaah diawali dengan penjelasan mengenai program pembangunan pemerintah Indonesia yang mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut didorong dengan krisis keuangan tahun 1997 yang melanda Indonesia dan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ramah akan investor asing. Awalnya pemerintah Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Malaysia untuk tujuan perdagangan spesifik yaitu pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia melihat Malaysia cukup berhasil untuk melakukan investasi ke negara-negara tetangga. Pada tahun 1980, investasi Malaysia ke negara-negara Asia Tenggara mencapai 146 juta USD, kemudian meningkat menjadi 3,4 milyar USD dan meningkat tajam pada tahun 2007 mencapai 12 milyar USD (Varkkey, 2013:14).

Malaysia telah terlebih dahulu menjalankan industri minyak sawit. Pada tahun 1980-an, Malaysia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Malaysia memiliki keterbatasan untuk memperluas lahan sawit karena menaruh perhatian terhadap standar *eco-certification*. Di forum internasional, Malaysia berjanji akan menjaga 50% hutannya di beberapa konferensi internasional, pada *Rio Earth Summit* tahun 1992 dan Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen tahun 2009. Kemudian pemerintah Malaysia menghentikan penggunaan lahan hutan untuk industri sawit. Kemudian, perusahaan sawit Malaysia berpaling ke Indonesia karena berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai *host country*. Beberapa perusahaan Malaysia yang membangun industri sawit besar adalah Sime Darby, Tabung Haji Plantations, Kuala Lumpur Kepong (KLK), Genting Plantations, and IOI Corporation (Varkkey, 2013:18).

Beberapa perusahaan Malaysia tersebut kemudian melakukan konversi lahan hutan dan lahan gambut dengan wewenang yang

diberikan oleh pemerintah Indonesia sehingga menjadi lahan sawit yang semakin diperluas untuk mengejar produksi yang tinggi. Kemudian, posisi Indonesia sebagai produsen sawit pertama terbesar di dunia. Pada tahun 2012, produksi sawit Indonesia mencapai 53% yang kemudian disusul oleh Malaysia sebesar 36%. Kemudian, sawit dijuluki sebagai primadona ekspor di balik campur tangan perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia hanya menempati negara pinggirannya yang menyediakan bahan mentah untuk kemudian diproduksi oleh negara semi pinggirannya dengan keleluasaan mendapatkan lahan berharga murah dan upah buruh yang minim.

Dalam rangka mencapai surplus produksi, pemerintah Indonesia menyusun target produksi dan perluasan produksi sawit. Pemerintah menyusun target produksi 40 juta ton CPO hingga 2020. Telah tercapai 26,7 juta hektar di bawah perizinan untuk perluasan perkebunan minyak kelapa sawit. Lebih lanjut, permintaan bahan baku untuk agrofuel untuk memenuhi pasar Uni Eropa dan kewajiban target memimpin penambahan 10-12 juta hektar perkebunan untuk produksi biofuel, dengan 65 persen ditujukan untuk ekspor (Jiwan: 2013:49). Relasi kuasa Indonesia dengan Uni Eropa menunjukkan hubungan antara Inti dan pinggirannya.

Tujuan dan Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Tabel 2. Tujuan dan Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia

No.	Negara	2013	2014	2015
1.	India	6,1 juta ton	5,1	5,8 juta ton
2.	China	2,67 juta ton	2,43	3,99 juta ton
3.	Uni Eropa	4 juta ton	4,13	4,23 juta ton
4.	Pakistan	903 ribu	1,66	2,19 juta ton
5.	Amerika	381,4 ribu	477,23 ribu	758,55 ribu
6.	Timur Tengah	1,98 juta ton	2,29 juta ton	2,11 juta ton

Sumber: Diolah dari data GAPKI yang tercantum dalam Refleksi Industri Kelapa Sawit 2014 dan 2015

Kebijakan penggunaan minyak nabati sebagai bahan utama bagi biodiesel (bahan bakar pengganti solar) ataupun biofuel (bahan bakar hayati) awalnya masif sebagai bagian kebijakan Uni Eropa. Uni Eropa gencar melancarkan kampanye mengenai konsumsi minyak sawit yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup sehingga memunculkan wacana penggunaan minyak sawit berkelanjutan sebagaimana yang menjadi syarat dalam RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Uniknya, Uni Eropa merupakan konsumen minyak sawit yang cukup tinggi permintaannya dengan membeli produk sawit Indonesia yang berharga murah akibat kampanye hitam tersebut (Wulansari & Sigit, 2016).

Uni Eropa dan negara-negara anggotanya membangun komitmen untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan global. Maka kebijakan internalnya mendorong penggunaan biofuel sebagai energi terbarukan berdasarkan ketentuan

Directive 2009/28/EC yang disahkan pada 23 April 2009. Kebijakan tersebut mengharuskan penggunaan 20 persen energi terbarukan, dengan komposisi 10 persen untuk energi terbarukan dan 10 persen konsumsi energi untuk sektor transportasi. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional Uni Eropa (National Renewable Energy Action Plan-NREAP). Pada Oktober 2010, 23 negara anggota Uni Eropa telah mengajukan NREAP kepada Komisi Eropa mengenai usulan penggunaan biofuel (GAPKI, 2015). Kebijakan Uni Eropa tersebut merupakan bagian perencanaan yang telah dimulai pada tahun 2003. Kebijakan penggunaan biofuel dan secara umum untuk energi biomassa, dalam rangka memperkuat kebijakan keamanan energi Eropa, yang menjamin keanekaragaman sumber-sumber energi dan berkurangnya intensitas karbon dalam perekonomian. Pada Desember 2005, Komisi Eropa mengumumkan Rencana Aksi Biomassa dan pada Februari 2006, Strategi Uni Eropa untuk Biofuel telah dipublikasikan (Chiavari, 2003: 199-200).

Sebanyak 46 persen ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke kawasan Uni Eropa masuk dengan bebas tarif masuk. Bahkan, impor Uni Eropa sangat terbuka bagi pasar minyak kelapa sawit Indonesia. Berdasarkan temuan Uni Eropa tahun 2012, ketika Uni Eropa memberlakukan dumping bagi produk minyak kelapa sawit untuk biodiesel dari Indonesia menyebabkan gejolak bagi industri di Uni Eropa. Maka kebijakan anti-dumping terhadap produk sawit Indonesia di Uni Eropa telah berakhir pada Mei 2013. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan impor minyak sawit dari Indonesia sebesar 70 persen berkisar 2,76 milyar USD tahun 2013 (Skoog, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rezim globalisasi telah memperlihatkan ketimpangan pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia. Resep kebijakan pembangunan yang diberikan IMF dan Bank Dunia mengenai pembangunan industri sawit memberikan keuntungan bagi kapitalis, namun meninggalkan dampak sosial dan lingkungan hidup yang cukup serius bagi masyarakat marjinal. Indonesia pun memainkan perannya sebagai pihak marjinal yaitu berada di posisi pinggirannya karena ambisi pemerintah untuk mengejar pendapatan melalui ekspor komoditas unggul secara ekonomi dengan lahan dan buruh murah sebagai fasilitas unggul bagi negara semi pinggirannya untuk mengamankan kebijakannya dan mendorong kegiatan ekonominya. Malaysia menunjukkan komitmen perlindungan lingkungan hidup dengan menjaga hutannya sesuai dengan janji di forum-forum internasional. Agar aktivitas ekonomi tercapai, maka tempat produksi sawit pun berpindah ke Indonesia dengan berbagai rasionalitas pendukungnya.

Pilihan bagi warga yang menghuni wilayah yang dipadati industri sawit semakin terbatas yaitu warga menjadi bagian dari industri sawit atau tidak menjadi buruh sawit dengan berbagai tantangannya. Namun, realitas bagi warga baik menjadi buruh sawit maupun berdikari tanpa industri sawit tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pilihan berdikari tanpa industri sawit menjadi opsi yang lebih baik karena memiliki lahan maupun alat produksi. Sementara bagi warga yang memilih menjadi buruh sawit dihadapkan kenyataan kosong yaitu tidak memiliki lahan, kondisi tinggal di lingkungan hidup yang kritis, dan kondisi ekonomi yang tergantung kapitalis dan politik komoditas. Maka, pilihan resistensi bagi warga desa atau warga yang termarginalkan menjadi pilihan menghadapi desakan globalisasi dan kapitalisme lokal. Resistensi menimbulkan konflik akibat

struktur yang terbentuk karena tatanan konsensus.

Saran

Dalam perumusan kebijakan pembangunan, pemerintah perlu melakukan dampak analisa lingkungan hidup dan sosial. Walaupun tuntutan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas negara untuk memberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemudian kebijakan yang pro pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dikaji mengenai siapa yang mendapatkan 'kebaikan' dari kebijakan tersebut. Kehidupan sosial merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Tatanan kehidupan sosial yang rapuh akan merusak ekosistem yang ada dan berdampak kerusakan lingkungan hidup yang kemudian akan merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang rawan terdampak. Resistensi yang ditunjukkan masyarakat bawah dan marjinal sebagai bentuk kemarahan dan perlawanan. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian, maka konflik dan kekerasan mungkin akan terjadi. Maka analisa dampak lingkungan hidup dan sosial tidak dapat dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2016. Dampak Kabut Asap Terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Ekspedisi Indonesia Biru.
- Boeije, Hennie. 2010. Analysis in Qualitative Research. SAGE. London.
- Chiavari, Joana. 2013. EU Biofuel Policies And Their Implications For Southeast Asia dalam Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia. A Transnational Perspective*. ISEAS. Singapura.
- Corley, R.H.V & P.B. Tinker. 2003. *The Oil Palm*. Fourth Edition. Blackwell Science. Oxford. Hal. 16
- Dahrendorf, Ralf. 1958. Toward a Theory of Social Conflict. *The Journal of Conflict Resolution* Vol 2. No. 2. pp. 170-183). [Internet]. [28 September 2016]. Diunduh dari: <http://www.csun.edu/~snk1966/Ralph%20Dahrendorf%20Toward%20a%20Theory%20of%20Social%20Conflict.pdf>
- GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). 2015. Refleksi Industri Kelapa Sawit 2014 dan Prospek 2015. [Internet]. [14 Maret 2016]. Diunduh dari: <http://www.gapki.or.id/Page/PressReleaseDetail?guid=dd997bd7-fbbe-4ef7-aace-192e71eac097%20%20>
- Giddens, Anthony. 1990. *The Consequences of Modernity*. Blackwell. Stanford.
- Hero Saharjo, Bambang & Lailan Syaufina. Topik C3. Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. CIFOR. [Internet]. [14 Maret 2016]. Diunduh dari: <http://www.cifor.org/ipn-toolbox/wp-content/uploads/pdf/C3.pdf>
- Jiwan, Norman. 2013. The Political Ecology of the Indonesian Palm Oil Industry. Dalam Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia. A Transnational Perspective*. ISEAS. Singapura.
- Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial. Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial. RajaGrafindo Perkasa. Jakarta.
- McCarthy, John; Vel, Jacqueline A.C & Afiff, Suraya. 2013. Arah Pergerakan Akuisisi dan Penutupan Lahan: Skema-skema Pengembangan, Pengambilalihan Semu, Dan Akuisisi Lahan Atas Nama Lingkungan Di Luar Jawa. *Jurnal WACANA*. No.30 Ekologi Politik REDD+. Insist Press. Yogyakarta. pp. 15-70
- Mizuno, Kosuke; Motoko S. Fujita & Shuichui Kawai (edited by). 2016. *Catastrophe and Regeneration in Indonesia's Peatlands: Ecology, Economy & Society*. NUS (National Univ of Singapore) Press & Kyoto Unive Press. Singapore.
- Mongabay. 2015. Tiga Bulan Hutan dan Lahan Terbakar Setara 4 Kali Luas Bali. [Internet]. [28 September 2016]. Diunduh dari: <http://www.mongabay.co.id/2015/10/31/tiga-bulan-hutan-dan-lahan-terbakar-setara-4-kali-luas-bali/>
- Nagata, Junji & Sachio W. Arai. 2013. Evolutionary Change In The Oil Palm Plantation Sector in Riau Province, Sumatra. *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia* dalam Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia. A Transnational Perspective*. ISEAS. Singapura.
- Peet, Richard & Elaine Hartwick. 2009. *Theories of Development. Contentions, Arguments, Alternatives*. The Guildford Press. New York.
- Raffles B. Panjaitan. 2015. Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Iklim. Seri Dialog UNORCID El Nino: Pembelajaran dari Pengalaman Masa Lalu untuk Memandu Perencanaan dan Tanggapan. KLHK. [Internet]. [28 September 2016]. Diunduh dari: http://www.unorcid.org/upload/PDF_-_Siti_Nissa_Mardiah_Ministry_of_Environment_and_Forestry_Disaster_El_Nino_-_Kebakaran_Hutan_dan_Lahan_serta_Iklim_7_Sept_2015_Bahasa.pdf
- Rencana Induk rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. 2008. Kerjasama antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kalimantan Tengah dan Pemerintah Belanda.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi*. Kreasi Wacana. Bantul
- Saharjo, Bambang Hero & Lailan Syaufina. Topik C3 Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. CIFOR. <http://www.cifor.org/ipn-toolbox/wp-content/uploads/pdf/C3.pdf>.
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak of the Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University. New Haven & London.
- Scott, James C. 1989. *Everyday Forms of Resistance*. *Copenhagen Journal of Asian Studies*. Vol. 4. pp.33-62. [Internet]. [28 September 2016]. Diunduh dari: <http://rauli.cbs.dk/index.php/cjas/article/view/1765>
- Siswaningsih, Yulia. 1999. Peranan Lembaga Keuangan Internasional dalam Pembangunan Perkebunan Berskala Besar di Indonesia dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara. Jakarta, 15-16 Maret 1999. Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Skoog, Olof. 2015. Facts About the EU and Palm Oil. [Internet]. [14 Maret 2016]. Diunduh dari: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/05/facts-about-eu-and-palm-oil.html>
- Stiglitz, Joseph. 2006. *Making Globalization Work*. Norton Company. New York.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik*. Kencana. Jakarta.
- SSI Review. 2014. *Palm Oil Market*. https://www.iisd.org/pdf/2014/ssi_2014_chapter_11.pdf.
- USAID & LESTARI. 15 Januari 2016. Studi Dampak Kebakaran Hutan dan di Lanskap Katingan dan kahayan. Tetra Tech. Burlington.
- Varkkey, Helena. 2012. The Growth and Prospects of the Palm Oil Plantation Industry in Indonesia. *Oil Palm Industry Economic Journal* Vol.12 No.2. pp.1-13. [Internet]. [14 Maret 2016]. Diunduh dari: <http://repository.um.edu>

- my/24311/1/opiej%202012%20publisher%20PDF.pdf
- Varkkey, Helena. 2013. Malaysian Investors in the Indonesian Palm Oil Plantation Sector: Home State Facilitation and Transboundary haze. *Journal Asia Pacific Business Review* Vol. 19. pp.381-401. [Internet]. [14 Maret 2016]. Diunduh dari: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13602381.2012.748262>
- Wahyu Catur adinugroho, IN N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, Labuani Sibora. 2005. *Manual for the Control of Fire in Peatlands and Peatland Forest*. Wetlands Indonesia. Bogor.
- Wakker, Eric. 2013. Leveraging Product and Capital Flows to Promote Sustainability in The Palm Oil Industry dalam Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia. A Transnational Perspective*. ISEAS. Singapura.
- Weber, Max. 1992. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge, New York.
- WRI (World Resources Institute). Kebakaran Hutan dan Lahan. [Internet]. [14 Maret 2016]. Diunduh Dari: https://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_chap4_id.pdf
- Wulansari, Ica & Ridzki R. Sigit. 2016. Masa Depan Minyak Sawit: Komoditas Bio Energi atau Komoditas Pangan? <http://www.mongabay.co.id/2016/05/30/masa-depan-minyak-sawit-komoditas-bio-energi-atau-komoditas-pangan/>

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Mongabay Indonesia. Khususnya kepada Dr. Ridzki R. Sigit selaku Program Manajer Mongabay Indonesia dan Indra Nugraha selaku Kontributor Berita Mongabay di Kalimantan Tengah. Selain itu, penulis berterima kasih atas masukan dan revisi yang diberikan oleh Dr. Wahyu Gunawan, Dosen Prodi Sosiologi Unpad.